



iDClear

Edisi 2 • 2025

NEWS



KPEI Perkuat Transparansi dan Likuiditas Pasar lewat Insentif MKBD untuk Transaksi *Triparty Repo*



Indeks

1 Insentif MKBD: KPEI Dorong Transparansi & Likuiditas Transaksi Triparty Repo

3 Implementasi DLP Amankan Data Investor di IDCLEAR

4 Mendorong Pertumbuhan Investor melalui Sosialisasi & Edukasi

5 Aturan Baru Liquidity Provider, Sinergi untuk Meningkatkan Likuiditas Pasar

6 Pasar Saham RI Unjuk Gigi Lawan Mitos Mei

7 Statistik

9 Event Highlight

Insentif MKBD

KPEI Dorong Transparansi & Likuiditas Transaksi *Triparty Repo*

P T Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) telah meluncurkan insentif berupa potongan *haircut* dalam perhitungan *Ranking Liabilities* transaksi *reverse repo* pada Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) bagi anggota kliring (AK) yang mendaftarkan transaksinya melalui Fasilitas Triparty Repo KPEI.

Kebijakan ini, yang berlaku sejak 1 Mei 2025, diharapkan mampu mendorong penggunaan infrastruktur pasar yang lebih transparan, meningkatkan pengelolaan risiko, dan pada akhirnya, memperkuat likuiditas transaksi *repo* di pasar modal.

Fasilitas Triparty repo itu sendiri merupakan salah satu layanan KPEI dalam memfasilitasi pelaku pasar melakukan transaksi repo yang aman dan teratur. KPEI sebelumnya telah menyediakan fasilitas *Triparty Repo* dan mulai digunakan oleh pelaku pasar sejak tahun 2022.

Sebelumnya, banyak transaksi repo dilakukan secara bilateral atau *over-the-counter* (OTC) antarpihak, dengan kewajiban hanya sebatas pelaporan.

Ari Tristianto, Kepala Divisi Kliring dan Penyelesaian KPEI (IDClear), menjelaskan bahwa pelaku pasar dalam menjalankan transaksi OTC memiliki kebebasan dalam menjalankan proses bisnis, termasuk manajemen risiko dan penyelesaian, sesuai dengan kesepakatan mereka.

Namun, kondisi ini menimbulkan kekhawatiran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama KPEI dan *self regulatory organization* (SRO) lainnya, menyusul insiden transaksi *repo* yang tidak terselesaikan atau repo "bodong" dan dapat mengganggu integritas pasar.

"Untuk itu, KPEI menyediakan fasilitas *Triparty Repo*. Jadi, melalui fasilitas ini kami menyediakan sistem untuk membantu mereka mengelola transaksi, marjinnya, *trade adjustment*, pengelolaan aksi korporasi seperti dividen dan kupon, bahkan memantau penyelesaiannya," katanya.

Untuk menambahkan manfaat atau *added value* bagi partisipan yang menggunakan fasilitas *Triparty Repo*, KPEI memiliki inisiatif untuk memberikan insentif lain. Insentif ini berakar dari Surat Edaran OJK No. 2/SEOJK.04/2023 yang mensyaratkan penerapan *haircut* atas pencatatan transaksi *reverse repo* dalam MKBD. KPEI kemudian mengusulkan kepada OJK agar pelaku yang menggunakan fasilitas *Triparty Repo* diberikan insentif berupa diskon *haircut*.

"Jika pelaku pasar menggunakan layanan *Triparty Repo* KPEI, kami akan memberikan insentif, yaitu tambahan manfaat atau *benefit* kepada pelaku untuk pencatatan transaksi *Repo*-nya di MKBD," jelas Ari.

Natalina Hutapea, Kepala Divisi Penjaminan dan Pengelolaan Risiko KPEI, menjelaskan bahwa diskon *haircut* ini bertujuan untuk menjaga ketahanan modal anggota kliring, sekaligus memberikan stimulus bagi AK untuk meningkatkan transaksi Repo. Dengan makin kecil bobot pengurangannya, modal AK akan makin terjaga. Insentif ini juga menjadi stimulus untuk mendorong transaksi yang tercatat di KPEI.

"Jadi, misalnya dia bertransaksi Repo dengan *haircut* MKBD-nya 10%. Kalau nanti transaksinya itu masuk ke dalam efek yang

dalam lingkup *Triparty Repo*, maka *haircut*-nya diberikan insentif misalnya menjadi 5%," terangnya.

Persetujuan OJK atas usulan insentif ini telah diterima KPEI pada 2024, dan implementasinya telah berlaku sejak 1 Mei 2024. Saat ini, insentif ini khusus untuk transaksi *Repo* dengan *underlying* saham, dan tidak semua efek diberikan insentif, melainkan berdasarkan kriteria tertentu dengan mempertimbangkan faktor risiko.

DAMPAK DAN HARAPAN KE DEPAN

Inisiatif ini sejalan dengan upaya KPEI untuk mendorong penggunaan infrastruktur pasar yang lebih transparan dan memberikan *value added* bagi pelaku pasar. Ari membandingkan konsep ini dengan pasar uang dan valuta asing (PUVA), di mana transaksi derivatif yang tidak masuk ke layanan pihak ketiga (CCP) akan dikenakan disinsentif berupa pencadangan permodalan yang lebih besar.

KPEI memilih pendekatan insentif untuk *Triparty Repo* karena fasilitas ini tidak dijamin seperti CCP, dan penggunaannya juga belum mandatori. Namun, tujuannya sama, yakni mendorong pelaku pasar memanfaatkan fasilitas yang lebih transparan dan memberikan kemudahan dalam mengelola transaksi reponya.

Ranti Kusuma Arini, Kepala Divisi Pengawasan dan Pemeriksaan KPEI, menambahkan bahwa dengan masuk ke sistem *Triparty Repo*, proses bisnis mulai dari pendaftaran kontrak hingga *margin call* akan tercatat dengan jelas, berbeda dengan Repo OTC yang seringkali hanya tercatat di akhir pelaporan dan bisa menimbulkan masalah.



Editorial

Di tengah geliat pasar modal yang terus berkembang, PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) berupaya konsisten memperkuat fondasi kepercayaan melalui inovasi layanan dan kebijakan yang adaptif. Pada edisi ini, kami mengulas lebih dalam insentif modal kerja bersih disesuaikan (MKBD) yang menjadi salah satu pendorong penting transparansi serta likuiditas transaksi *Triparty Repo* di pasar surat berharga negara (SBN).

Kami juga membahas bagaimana penerapan *data loss prevention* (DLP) mempertegas komitmen IDCclear dalam

menjaga keamanan data, serta langkah-langkah strategis yang dijalankan untuk memperkuat tata kelola informasi. Selain itu, beragam inisiatif sosialisasi dan edukasi turut menjadi fokus, sebagai wujud dukungan KPEI dalam menciptakan pertumbuhan investor yang sehat dan berkelanjutan.

Tak hanya itu, hadir pula pembahasan seputar aturan baru *Liquidity Provider* yang diharapkan membawa energi baru bagi likuiditas pasar saham, serta insight tentang dinamika psikologis investor dalam menghadapi fluktuasi pasar. Data

statistik terkini dan kilas balik berbagai kegiatan KPEI sepanjang Maret hingga Juni 2025 kami sajikan sebagai bagian dari upaya transparansi dan keterbukaan informasi.

Semoga *IDClear News* Edisi II – 2025 ini dapat memberikan inspirasi dan menjadi rujukan positif bagi seluruh pemangku kepentingan pasar modal.

Salam Semangat,
Redaksi *IDClear News*

- KPEI menyediakan insentif MKBD bagi pelaku pasar yang menggunakan layanan *Triparty Repo* untuk pencatatan transaksi Reponya.
- Selain sebagai stimulus, diskon *haircut* diberikan untuk membantu menjaga ketahanan modal anggota kliring dalam rangka meningkatkan transaksi Repo.
- KPEI memastihkan Insentif MKBD ini tetap sejalan dengan prinsip kehati-hatian.

Sejak diberlakukan 1 Mei 2025, KPEI telah melakukan sosialisasi intensif kepada seluruh Anggota dan Partisipan Kliring. Meskipun masih dalam tahap awal, terjadi peningkatan jumlah kontrak repo yang masuk ke *Triparty Repo* sebesar 31% pada bulan pertama dengan total nilai kontrak repo sebesar Rp217,15 miliar.

Peningkatan ini juga dapat dilihat dari bertambahnya partisipasi AK yang mendaftar sebagai peserta *Triparty Repo*, mengingat tidak semua perusahaan efek atau AK telah menjadi partisipan sebelumnya. Saat ini telah terdapat partisipan pada Fasilitas *Triparty Repo* sebanyak 17 Partisipan. Manfaat insentif ini hanya bisa dirasakan setelah terdaftar sebagai partisipan.

KPEI memastikan bahwa pemberian insentif ini tetap sejalan dengan prinsip kehati-hatian. Ranti Arini menjelaskan bahwa OJK telah menambahkan pagar risiko pada saat SE OJK di terbitkan pada tahun 2023, dengan memberlakukan *haircut* pada nilai pasar wajar saham yang sebelumnya tidak di-*haircut*.

KPEI juga melakukan validasi transaksi *repo* dan berkoordinasi ketat dengan OJK, Bursa Efek Indonesia (BEI), dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dengan

laporan rutin disampaikan setiap bulan. Selain itu, KPEI juga menerbitkan daftar saham yang tidak mendapatkan insentif ini dalam *Watchlist* Efek Repo dengan kriteria tertentu terhadap *underlying* repo yang berisiko.

"Jangan sampai dia sudah ada di *Triparty Repo* KPEI, tetapi tidak memanfaatkan fasilitas itu. Atau yang kedua, jangan sampai dia tidak ada di fasilitas kita, tetapi memanfaatkan *haircut* kita yang lebih kecil. Nah, jadi tugas KPEI adalah memvalidasi transaksi yang dilakukan melalui fasilitas *Triparty Repo* KPEI, sesuai Surat Persetujuan OJK" katanya.

Natalina Hutapea menyampaikan bahwa usulan insentif ini berawal dari masukan pelaku pasar, sehingga diharapkan sesuai dengan keinginan mereka. Meski butuh waktu bagi pasar untuk beradaptasi, KPEI optimistis bahwa diskon *haircut* akan menjadi daya tarik.

"Dengan kasih diskon *kan* pasti intensinya jadi ingin terus. Harapannya *sih* lebih ke situ," ujar Natalina.

Hingga saat ini, insentif ini tidak memiliki masa berlaku spesifik, direncanakan sebagai insentif jangka panjang untuk menjaga pelaku pasar bertahan di sistem KPEI dan tidak kembali ke transaksi OTC yang kurang terawasi.

Secara keseluruhan, insentif MKBD untuk *Triparty Repo* adalah langkah strategis KPEI bersama OJK untuk meningkatkan kualitas transaksi *repo* di pasar modal, menjadikannya lebih aman, transparan, dan terawasi, serta memberikan manfaat ekonomis bagi AK melalui perbaikan pelaporan dan menjaga ketahanan modal.



Penerbit:
PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia

Penasihat:
Direksi

Penanggung Jawab:
Sekretaris Perusahaan

Dewan Redaksi:
Lisda Rumondang Sitohang, Caroline Claudia
Christy, Mohamad Farhan Fawwaz, dan Marcellino
Candra Wijaya

Alamat Redaksi & Sirkulasi:

Gedung Bursa Efek Indonesia,
Menara I Lt. 5
Jln. Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Telepon : 021-515 5115; 515 5125

Toll Free : 0800-100-KPEI (5734)

Email : customer.care@idclear.co.id

Website : www.idclear.co.id



Implementasi DLP

Amankan Data Investor di IDClear



Dalam ekosistem pasar modal digital yang terus berkembang, perlindungan data investor menjadi krusial untuk menjaga kepercayaan dan integritas sistem. IDClear (Kliring Penjaminan Efek Indonesia/KPEI) mengambil langkah strategis dengan mengimplementasikan sistem *Data Loss Prevention* (DLP) di lingkungan operasional IDClear.

Langkah ini merupakan respons proaktif KPEI terhadap dinamika ancaman siber serta pemenuhan mandat Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Urgensi implementasi DLP ini telah lama menjadi bagian dari peta jalan KPEI untuk perlindungan data. Kehadiran UU PDP memberikan dorongan kuat untuk percepatan penerapan teknologi ini.

Antonius Hendra, *Senior Information Technology Security Specialist* KPEI mengungkapkan bahwa selain untuk menerapkan amanah UU PDP, implementasi DLP ini juga ditujukan untuk menjaga nama baik KPEI dan juga pasar modal Indonesia.

"Data finansial adalah data yang bersifat pribadi dan rahasia. Nah, karena itu untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap data transaksinya, kami melakukan implementasi ini, sehingga diharapkan mereka nyaman bertransaksi di pasar modal Indonesia," katanya.

Dia menambahkan, perlindungan data pribadi memerlukan pendekatan teknologi, sehingga KPEI memastikan implementasi DLP benar-benar menggunakan teknologi

mutakhir dan mumpuni. Meskipun KPEI bersyukur belum pernah mengalami insiden signifikan seperti kehilangan atau pencurian data oleh peretas, tren ancaman siber yang meningkat mendorong KPEI untuk melakukan tindakan pencegahan.

Sistem KPEI yang terhubung ke internet, seperti website, memang sering menjadi target serangan, tetapi teknologi perlindungan yang sudah ada berhasil memitigasinya di area internet, mencegah dampak pada operasional. Implementasi DLP ini juga mendukung kebijakan kerja *hybrid*, memastikan data internal perusahaan tetap aman pada saat diakses oleh pegawai atau karyawan dari luar kantor.

STANDAR INTERNASIONAL

Klasifikasi data di KPEI dilakukan berlandaskan standar internasional ISO 27001:2022. Data dikategorikan menjadi Publik, Internal (Kode A), dan Rahasia (Kode B).

Pegawai di lingkup KPEI, sebagai pengguna data, memiliki fleksibilitas untuk memberi label sesuai dengan sensitivitas data yang mereka kelola. Di luar klasifikasi umum, sistem DLP KPEI juga dikonfigurasi khusus untuk melindungi data sangat sensitif seperti nomor KTP dan SID (*single investor identification*) investor.

Sistem DLP ini dirancang untuk bekerja secara *real-time*. Hendra menegaskan, pemblokiran terjadi langsung dari laptop karyawan jika ada pengiriman data pribadi yang tidak sesuai prosedur.

"Apabila ada pengiriman data yang bersifat rahasia, tapi kita mengirimnya lewat prosedur yang kurang aman seperti melalui WhatsApp atau Google Drive, maka DLP akan melakukan *blocking*," jelas Hendra.

DLP KPEI menggunakan Microsoft Purview. Teknologi ini mencakup perlindungan di berbagai area: *endpoint* (laptop karyawan), email, dan *cloud* (OneDrive). Seluruh area ini berada di bawah cakupan Microsoft Purview. Penerapan *Artificial Intelligence* (AI) dalam arsitektur DLP masih dalam kajian untuk tahap berikutnya.

Kewajiban pemenuhan UU PDP membawa perubahan signifikan di KPEI. Dari sisi organisasi sudah dibentuk tim gugus tugas (*task force*) PDP. Tim ini vital dalam perumusan kebijakan perlindungan data, yang kemudian akan diimplementasikan oleh semua divisi dan secara teknis akan didukung teknologi yang dikelola oleh Divisi OTI. Proyek DLP ini, termasuk pembentukan tim *task force*, sudah dimulai sejak awal 2024.

Selain teknologi dan kebijakan, KPEI sangat menekankan edukasi dan pengawasan internal bagi sumber daya manusia. Kesadaran karyawan penting dalam upaya perlindungan data. Edukasi dilakukan oleh Unit PST-Divisi PSM, meliputi email *awareness* dan sosialisasi berkala dengan *pre-test* dan *post-test*. Tujuannya meningkatkan kehati-hatian karyawan untuk mengurangi insiden pelanggaran kebijakan pengelolaan data.

Lebih lanjut, untuk memastikan sistem DLP tetap relevan menghadapi tantangan masa depan, KPEI menjalin kerja sama erat dengan pihak pemerintah, khususnya BSSN, untuk mendapatkan notifikasi perkembangan serangan siber, termasuk yang memanfaatkan AI. KPEI juga berkolaborasi dengan pihak ketiga spesialis keamanan siber untuk *update* pengetahuan dan saran profesional.

Implementasi dan pembaruan teknologi keamanan seperti *firewall*, *web application firewall* (WAF), dan antivirus juga terus dilakukan untuk menjaga benteng pertahanan data. Melalui kombinasi upaya internal yang kuat (standar, teknologi, kebijakan, edukasi) dan kolaborasi eksternal (pemerintah dan vendor ahli), KPEI berupaya keras agar sistem DLP-nya senantiasa mutakhir dan mampu melindungi data di tengah dinamika ancaman yang ada.



Mendorong Pertumbuhan Investor melalui Sosialisasi & Edukasi

Peningkatan jumlah investor pasar modal merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan pasar yang dalam, inklusif, dan berdaya saing. Untuk mencapai hal tersebut, sosialisasi dan edukasi merupakan pilar penting untuk meningkatkan kepercayaan *public* serta meningkatkan tingkat literasi keuangan.

Pasar modal Indonesia mampu membukukan pertumbuhan positif di tengah berbagai tantangan mulai dari domestik hingga perekonomian global pasca pandemi Covid-19 yang melanda dunia pada 2020. Jumlah investor bertumbuh signifikan dari 2,5 juta pada 2019 atau sebelum pandemi menjadi 14,9 juta investor hingga akhir 2024.

Dalam Roadmap Pasar Modal Indonesia 2023 – 2027, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama *self-regulatory organization* (SRO) menetapkan target pertumbuhan dua juta investor setiap tahunnya, sehingga total investor pasar modal diharapkan mencapai 20 juta pada tahun 2027.

Untuk mendukung pencapaian tersebut, berbagai inisiatif sosialisasi dan edukasi terus digencarkan termasuk oleh Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), sebagai salah satu SRO yang memegang

peran strategis dalam infrastruktur pasar modal.

Kepala Unit Pengembangan Pasar, KPEI Doni Irawan, menekankan bahwa pertumbuhan jumlah investor tidak hanya bertujuan untuk memperluas partisipasi, tetapi juga untuk mendorong pendalaman pasar. “Dengan semakin banyaknya investor, investasi akan berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan pasar dan perekonomian nasional,” ujarnya. Menurut Doni, salah satu aspek krusial dalam mendukung pendalaman pasar adalah menumbuhkan kepercayaan investor. Untuk itu, KPEI bersama OJK, Bursa Efek Indonesia (BEI), dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) terus berkolaborasi dalam memperkuat pemahaman fundamental investor, mencakup aspek keuntungan, risiko investasi, hingga literasi keuangan secara menyeluruh, baik bagi calon investor maupun investor aktif.

Sebagai bentuk konkret dukungan terhadap *Roadmap Pasar Modal*, KPEI menyelenggarakan berbagai program edukasi yang ditujukan langsung kepada masyarakat umum maupun pelaku industri sekuritas. Komunikasi eksternal KPEI terbagi menjadi dua pendekatan: pertama, menasar langsung komunitas,

publik investor dan calon investor; kedua, menasar pelaku industri sebagai agen edukasi lanjutan.

KPEI bersama BEI dan KSEI secara aktif melakukan sosialisasi termasuk ke berbagai wilayah Indonesia dari Sumatra hingga Papua melalui kegiatan seperti kuliah umum di kampus, diskusi komunitas, dan seminar dengan pelaku industri. Strategi ini bertujuan memperluas pemahaman masyarakat terhadap investasi dan peran SRO termasuk dalam perlindungan investor di pasar modal.

Di sisi lain, melalui program *training for trainer*, KPEI memberikan pelatihan kepada perusahaan sekuritas agar tim operasional dan pemasaran mereka dapat menjadi perpanjangan tangan dalam menyampaikan informasi yang akurat dan tepat kepada investor.

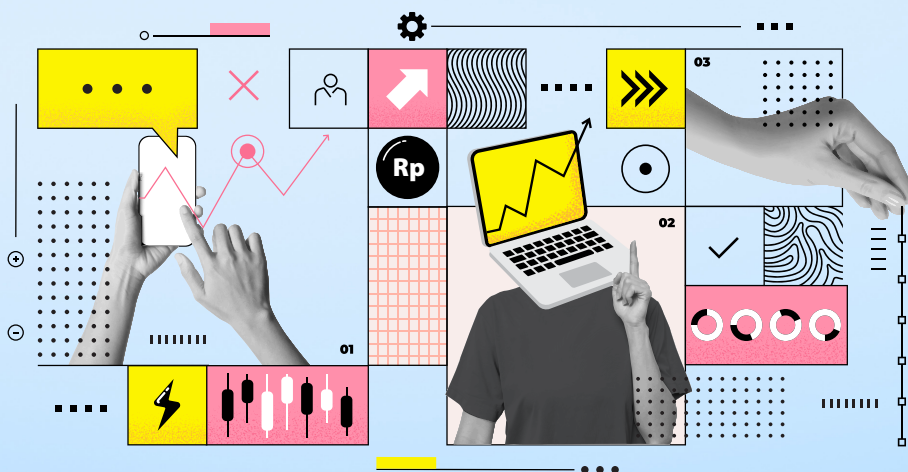
Kondisi geografis Indonesia yang luas dan demografis yang beragam menjadi tantangan tersendiri dalam menyampaikan edukasi pasar modal secara merata. Di era digital yang diwarnai persebaran informasi yang cepat termasuk misinformasi KPEI mengadopsi pendekatan komunikasi digital untuk menjangkau masyarakat lebih luas secara geografis maupun generasi.

Kepala Unit Komunikasi dan Informasi Publik Kliring Penjaminan Efek Indonesia Caroline Claudia Christy memaparkan bahwa secara korporasi, situs resmi atau *website* menjadi saluran utama perseroan dalam menyampaikan edukasi serta dokumen resmi terkait produk hingga kebijakan terbaru. Di samping itu, KPEI juga mengoptimalkan berbagai platform digital lainnya seperti media sosial, YouTube, dan LinkedIn.

“Generasi milenial dan Gen Z merupakan segmen yang dominan di pasar pascapandemi. Mereka sangat aktif di media sosial, sehingga kami perlu menyesuaikan strategi komunikasi kami agar relevan dengan preferensi mereka,” jelas Claudia.

Melalui berbagai konten edukatif dan interaktif seperti wawancara khusus, video penjelasan kebijakan, serta infografik, KPEI berhasil menjangkau segmen yang lebih luas. Respons positif dari publik tercermin dari tingginya tingkat interaksi dan trafik pengunjung pada platform digital KPEI.

Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen KPEI dalam memperkuat peran pasar modal sebagai sarana inklusif pembangunan ekonomi nasional melalui edukasi yang menyeluruh, berkelanjutan, dan berbasis teknologi.





Aturan Baru *Liquidity Provider*, Sinergi untuk Meningkatkan Likuiditas Pasar

Sebagai bagian dari upaya memperkuat struktur pasar dan meningkatkan efisiensi transaksi, Bursa Efek Indonesia (BEI) resmi menerapkan dua peraturan baru terkait penyedia likuiditas atau *liquidity provider* (LP) saham, yaitu Peraturan Bursa Nomor II-Q tentang Kegiatan *Liquidity Provider* Saham di Bursa dan Peraturan Bursa Nomor III-Q tentang *Liquidity Provider* Saham, yang berlaku efektif mulai **8 Mei 2025**.

Kedua regulasi ini merupakan tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penyedia Likuiditas, yang secara eksplisit mendukung pembentukan infrastruktur dan kerangka kerja likuiditas yang lebih sehat, inklusif, dan kompetitif.

Dengan hadirnya aturan tersebut, skema *Liquidity Provider* (LP) kini memiliki kerangka pengaturan yang lebih jelas dan terintegrasi. Peraturan Nomor II-Q mengatur secara komprehensif mengenai mekanisme pelaksanaan kegiatan LP, termasuk kriteria saham yang dapat dikuotasikan, kewajiban kuota harga beli dan jual, serta standar performa penyedia likuiditas dalam menjaga ketersediaan harga yang wajar di pasar.

Secara terperinci, saham yang dapat dikuotasikan oleh *liquidity provider* saham dengan mempertimbangkan parameter volume transaksi harian, frekuensi transaksi harian, kapitalisasi pasar, *spread* harga, rasio *free float* dan fundamental saham. Dengan demikian, implementasi kebijakan ini berlaku untuk saham yang tercatat di BEI secara terpilih.

BEI akan menerbitkan Daftar Efek *Liquidity Provider* Saham setiap hari bursa, yang menjadi acuan kuota bagi penyedia likuiditas. Strategi ini diharapkan meningkatkan likuiditas dan efisiensi perdagangan pada saham-saham tersebut.

Lebih lanjut, persyaratan dan prosedur permohonan pengajuan anggota bursa

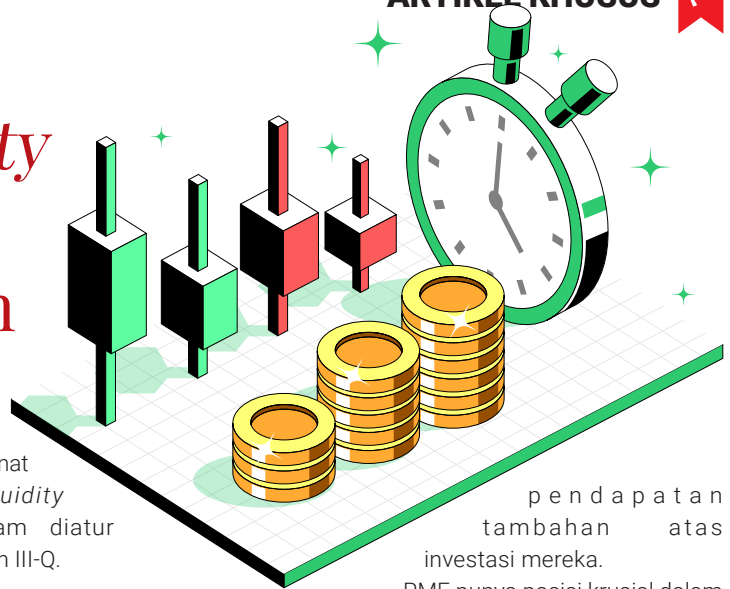
(AB) yang berminat menjadi *liquidity provider* saham diatur dalam Peraturan III-Q.

Peraturan III-Q menetapkan persyaratan serta prosedur pengajuan bagi Anggota Bursa (AB) yang ingin berperan sebagai LP. Persyaratan utama mencakup:

- Tidak dalam status suspensi perdagangan
- Memiliki Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) minimum Rp100 miliar
- Menyusun *standard operating procedure* (SOP) internal yang memadai
- Memiliki sistem untuk penyampaian kuota harga beli dan jual secara *real-time*

Melalui peran aktif anggota bursa, skema ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas perdagangan saham, terutama bagi saham-saham dengan likuiditas menengah dan rendah namun memiliki fundamental yang solid. Kebijakan terbaru ini diharapkan akan mendorong perdagangan pasar saham Indonesia lebih stabil dan dilakukan dengan *price discovery* yang lebih baik.

Kepala Unit Pengembangan Pasar Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), Doni Irawan, menekankan bahwa keberhasilan skema LP akan sangat ditopang oleh keberadaan layanan Pinjam Meminjam Efek (PME). PME menjadi instrumen penting dalam menjamin ketersediaan saham bagi LP sekaligus memberikan potensi pendapatan tambahan bagi investor. Doni mengatakan instrumen yang tidak kalah penting dari penerapan *liquidity provider* saham yakni pinjam meminjam efek (PME). Layanan ini memegang posisi vital dalam menjamin likuiditas di pasar modal karena memungkinkan investor meminjamkan atau meminjam efek untuk memberikan



pendapatan tambahan atas investasi mereka.

PME punya posisi krusial dalam membentuk pasar yang likuid, karena memberikan ruang bagi investor maupun LP untuk mengelola kepemilikan saham secara lebih dinamis,” jelas Doni.

Terdapat dua mekanisme penyediaan saham untuk *liquidity provider* melalui PME yakni reguler dan bilateral. Dalam PME reguler, terdapat batasan-batasan seperti instrumen yang digunakan, penetapan biaya, jenis agunan, hingga jumlah unit.

PME bilateral memiliki ruang gerak yang lebih luas seperti jenis instrumen, biaya yang disepakati secara bilateral, jumlah unit, hingga pengembalian efek yang dapat dilakukan sebelum batas waktu pinjaman yang telah disepakati.

Di sisi lain, Kepala Unit Komunikasi dan Informasi Publik KPEI, Caroline Claudia Christy, menyoroti bahwa meskipun skema LP telah lazim diterapkan di berbagai bursa global, implementasinya di Indonesia masih menghadapi tantangan, terutama terkait stigma negatif terhadap peran *market maker*.

“Sayangnya, saham yang tidak likuid kerap diasosiasikan dengan kinerja buruk, padahal ada banyak emiten pasca-IPO yang sebenarnya memiliki kinerja baik namun belum dikenal luas,” ujarnya. Claudia menekankan bahwa LP justru dapat menjadi jembatan untuk membangun persepsi positif dan mendorong transaksi saham-saham yang sebelumnya kurang diperhatikan investor.

Implementasi skema *liquidity provider* dan layanan PME menegaskan komitmen regulator memperkuat fondasi pasar modal melalui pendekatan berbasis data, transparansi, dan mitigasi risiko. Dengan dukungan kebijakan yang terarah dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, pasar modal Indonesia siap tumbuh menjadi ekosistem yang lebih likuid, efisien, dan partisipatif.



Pasar Saham RI Unjuk Gigi Lawan Mitos Mei

Bulan Mei kerap menjadi momok bagi sebagian besar pelaku pasar, khususnya para investor saham. Periode ini disebut menjadi momen para investor hingga manajer investasi melepas saham lalu kembali mengakumulasinya setelah Oktober atau dikenal sebagai fenomena *sell in May and go away*.

Pasar saham Indonesia mampu melawan mitos *sell in May and go away* dengan membukukan catatan kinerja mentereng sepanjang Mei 2025. Indeks komposit tercatat justru menguat 7,44% dalam sebulan dan sekaligus menjadi rapor terbaik untuk periode Mei dalam 10 tahun terakhir.

Pergerakan IHSG mampu kembali ke 7.000 pada Mei 2025. Investor asing kembali melirik pasar saham Indonesia sepanjang bulan lalu yang tecermin dari catatan *net buy* atau beli bersih total senilai Rp4,32 triliun bulan sepanjang bulan lalu.

Deretan kabar dari luar negeri menjadi katalis pendongkrak pergerakan pasar saham Indonesia sepanjang Mei 2025

sehingga mampu menorehkan rapor mentereng. Salah satu angin segar datang dari meredanya tensi perang dagang antara China dan Amerika Serikat (AS).

Suntikan tenaga bagi pasar saham Indonesia turut datang dari dalam negeri. Keputusan Bank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga acuan BI Rate ke 5,50% dinilai sebagian pelaku pasar sebagai langkah akomodatif untuk memacu pertumbuhan ekonomi.

INOVASI SRO

Geliat pasar modal Indonesia di tengah bayang-bayang tantangan baik global maupun domestik tidak terlepas dari peran seluruh pemangku kepentingan mulai dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga *self-regulatory organization* (SRO) termasuk IDClear atau Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI).

Lebih jauh, KPEI berperan tidak hanya dalam memastikan proses penyelesaian transaksi berjalan secara efisien dan aman tetapi juga menyediakan produk alternatif

investasi seperti pinjam meminjam efek (PME) dan *triparty repo*.

KPEI kini terus berinovasi untuk mendukung pendalaman pasar modal lewat pengembangan modul *triparty repo* untuk SBN, pengembangan sistem e-IPO untuk efek bersifat utang dan suku (EBUS), hingga pengembangan sistem kliring dan sistem *risk management* untuk derivatif keuangan.

KPEI berkolaborasi dengan SRO lain terus berkolaborasi dalam hal aspek pengawasan dengan pengembangan sistem lanjutan pengawasan terintegrasi. KPEI senantiasa melakukan penyempurnaan infrastruktur, perangkat, dan teknologi informasi, serta peningkatan kompetensi karyawan dalam mendukung keandalan operasional dan perluasan bisnis perusahaan.

Dalam hal perlindungan investor, KPEI secara aktif melakukan sosialisasi dan edukasi tidak hanya yang terkait dengan peluang investasi di pasar modal tetapi juga pada aspek risiko. Berbagai saluran komunikasi bahkan dimanfaatkan secara optimal mulai dari *website*, aplikasi, hingga media sosial.

Temukan Minimal 5 Kata yang terkait dengan IDClear



Kuis
Temukan
Kata
IDClear

V	D	V	G	M	B	M	F	E	I	V	A	B	I
A	P	T	R	I	P	A	R	T	Y	M	O	A	D
L	S	V	E	A	I	R	S	G	D	G	K	O	C
U	O	F	P	M	D	K	K	S	V	M	L	I	L
T	T	O	O	C	B	E	P	R	T	R	I	M	E
A	D	T	E	V	D	T	E	F	C	V	R	P	A
A	K	D	M	A	R	O	I	D	D	C	I	R	R
S	E	R	E	K	S	A	D	A	N	A	N	F	E
I	N	V	E	S	T	A	S	I	B	D	G	F	O
N	V	E	N	A	S	A	B	A	H	V	C	K	S
G	A	K	P	A	S	A	R	M	O	D	A	L	A
E	S	A	H	A	M	P	E	K	T	V	R	V	B
A	P	T	E	P	O	R	T	O	F	O	L	I	O

Silakan jawab pertanyaan KUIS IDClear ini melalui Instagram [@id_clear](https://www.instagram.com/id_clear) pada postingan *IDClear News Edisi II 2025 (pinned post)*, dengan format; Jawaban KUIS. diikuti dengan kata yang berhasil ditemukan. Jangan lupa, ajak dan *mention* 3 orang teman sebagai syaratnya.

Cek *IDClear News* untuk membantu menemukan jawabannya.

Jawaban selamatnya diterima pada 31 Juli 2025.

Dapatkan hadiah menarik dari IDClear untuk 5 orang yang beruntung.



TRANSAKSI BURSA

	Frekuensi (kali)	Volume (lembar)	Nilai (Rp)
Total 2025	110.969.423	1.910.059.802.089	1.175.779.661.470.760
Rata-rata Harian 2025	1.219.444	20.989.668.155	12.920.655.620.558

Data sampai dengan 31 Mei 2025



PENYELESAIAN TRANSAKSI BURSA

	Penyelesaian Transaksi Bursa		Efisiensi	
	Volume	Nilai	Volume (%)	Nilai (%)
Total 2025	642.467.613.900	389.906.553.535.100	60,15	60,83
Tertinggi Harian	13.795.023.700	8.876.323.790.600	68,33	66,85
Rata-rata Harian	7.060.083.669	4.284.687.401.485	60,02	60,90
Terendah harian	4.353.527.100	2.685.432.867.000	44,94	54,19

Data sampai dengan 31 Mei 2025

ALTERNATE CASH SETTLEMENT (ACS)

	ACS		Jumlah AK (ACS)	
	Volume	Nilai	AK Serah	AK Terima
Total	149.877.300	15.454.483.000	10	32
Tertinggi	142.423.900	14.954.509.500	2	11
Rata-rata	18.734.663	1.931.810.375	1	4
Terendah	2.100	766.500	1	1

Data sampai dengan 31 Mei 2025

FASILITAS INTRADAY

Penggunaan (Rp)	Biaya (Rp)
124.300.068.193.520,00	Total Penggunaan 1.647.510.932,76
24.860.013.638.704,00	Rata-rata Bulanan 329.502.186,55
1.365.934.815.313,41	Rata-rata Harian 18.104.515,74

Data sampai dengan 31 Mei 2025

POSISI DANA JAMINAN

Ekuiti Nilai (Rp) 5.694.689.756.673 Persentase 63,83%	Surat Utang Nilai (Rp) 1.087.103 Persentase 0,00%
Derivatif-Kontrak Berjangka Nilai (Rp) 601.934.962 Persentase 0,01%	Waran Terstruktur Nilai (Rp) 427.622.280 Persentase 0,00%
	Hasil Pengelolaan Dana Jaminan Ekuiti, KBIE dan Obligasi Nilai (Rp) 3.225.739.405.132,86 Persentase 36,16%
Total Nilai (Rp) 8.921.459.806.150,86 Persentase 100%	

Data per 31 Mei 2025

POSISI CADANGAN JAMINAN

Cadangan Jaminan	Nilai (Rp) 199.439.205.140,58
------------------	----------------------------------

Data per 31 Mei 2025



**Keep Updated
About Us & Follow
Our Social Media**



IDClear-Kliring
Penjaminan Efek
Indonesia



IDClear



www.idclear.co.id



kliring penjaminan
efek indonesia



id_clear



@Ask_IdClear



id_clear



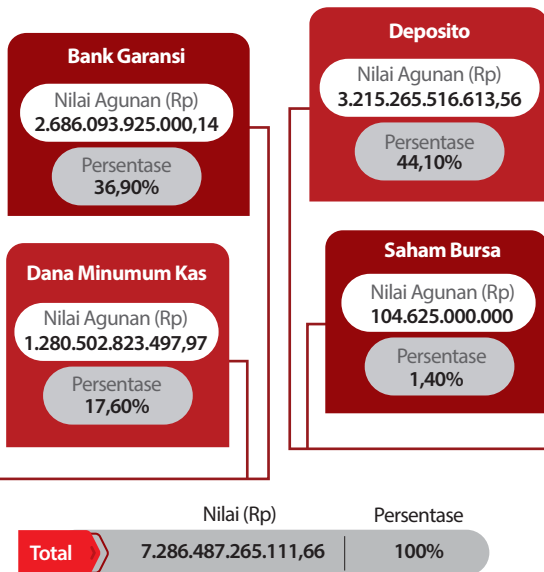


TRANSAKSI PINJAM MEMINJAM EFEK

	Total			Rata-Rata Harian		Jumlah Hari
	(Nilai)	(Volume)	(Frekuensi)	(Nilai)	(Volume)	
Januari	637.624.500	193.000	4	20.568.532	6.226	31
Februari	6.915.121.000	1.381.300	5	246.968.607	49.332	28
Maret	1.231.377.700	1.408.400	11	39.721.861	45.432	31
April	2.934.296.000	2.486.900	16	97.809.867	82.897	30
Mei	1.837.392.800	1.256.600	17	59.270.735	40.535	31

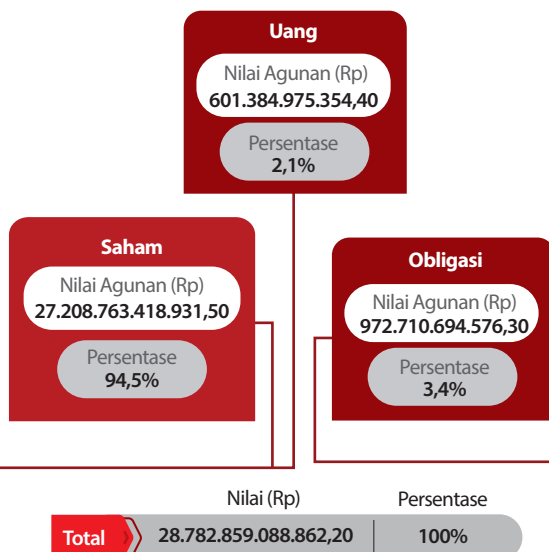
Data sampai dengan 31 Mei 2025

KOMPOSISI AGUNAN OFFLINE



Data sampai dengan 31 Mei 2025

KOMPOSISI AGUNAN ONLINE



Data sampai dengan 31 Mei 2025

DATA TRANSAKSI TRIPARTY REPO

	Total	
	(Nilai)	(Volume)
Januari	Rp0	0
Februari	Rp23.500.000.000	167.857.200
Maret	Rp19.000.000.000	11.636.407.000
April	Rp37.000.000.000	264.347.200
Mei	Rp87.300.000.000	848.945.450

Data sampai dengan 31 Mei 2025

TRANSAKSI DERIVATIF

	(Frekuensi (kali))	(Volume (kontrak))	(Nilai (Rp))
LQ 45	0	0	0
IDX 30	0	0	0
SSF	361	1.815	880.090.000
KBIA	0	0	0
Single Stock Futures (Total)	361	1.815	880.090.000
Kontrak Berjangka Index Asing (Total)	0	0	0
Index Futures (Total)	0	0	0
Indonesia Government Bond Futures	0	0	0

Data sampai dengan 31 Mei 2025

TRANSAKSI PUVA

	Trades Registered DNDF		Outstanding Position DNDF	
	(Frekuensi (kali))	(Volume (kontrak))	(Frekuensi (kali))	(Volume (kontrak))
Total 2025	276	14.933.854.000.000	40	3.424.718.000.000
Tertinggi harian	16	1.010.170.000.000	52	3.753.498.000.000
Rata-rata harian	3	164.108.285.714	28	1.591.190.439.560
Terendah harian	0	0	8	229.300.000.000

Data sampai dengan 31 Mei 2025



**FGD Pencatatan
Akuntansi Transaksi
PUVA oleh IDCclear
(18 Maret 2025)**



**OJK Terbitkan Kebijakan Buyback Saham
Tanpa Melalui Rapat Umum Pemegang
Saham (RUPS) (19 Maret 2025)**



**IDClear Menjadi Narasumber dalam The
WFE's Clearing and Derivatives Conference
2024 di Korea Selatan (1 April 2025)**



**IDClear Raih Sertifikasi ISO/IEC
27001:2022 dan ISO 37001:2016
(17 April 2025)**



**KPEI Menjadi Narasumber dalam Executive Exposure Visit
Program 2025 bersama Delegasi SBAN Nepal (22 April 2025)**



**SRO Pasar Modal Gelar ICME
(Capacity Building and Networking 2025) (7 Mei 2025)**



**Pasar Modal Indonesia
Gelar Tiga Kegiatan
CSR di Provinsi
Sumatera Utara
(15 Mei 2025)**



**KPEI Menjadi Narasumber Pada Training
for Trainers di Makassar (22 Mei 2025)**



**KPEI Menjadi Narasumber Pada Acara
Edukasi Pasar Modal STIEM Bongaya
Makassar (22 Mei 2025)**



**KPEI Hadiri Citi Securities Leadership
Forum 2025 (22 Mei 2025)**



**KPEI Salurkan Bantuan untuk
Pengembangan Proyek Integrasi
Pengelolaan Sampah di Desa Keliki, Bali
(24 Mei 2025)**



**Tanam 1.500 Pohon di Banyumas, Pasar Modal Berdayakan
Ekonomi dan Konservasi Lingkungan (27 Mei 2025)**



**Pasar Modal Salurkan Bantuan Kesehatan
dan Lingkungan di Papua (29 Mei 2025)**